

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap daerah di Indonesia, memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, merupakan titik tolak dimulainya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sepenuhnya terhadap kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, otonomi daerah pada hakikatnya memberikan kepada daerah sebuah peluang yang besar untuk lebih mengoptimalkan potensi daerahnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Salah satu alasan pelaksanaan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah dapat berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Hal ini merupakan bentuk perbaikan atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini hanya memprioritaskan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan di daerah (Sarletta, 2020).

Dalam Islam, berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang bertakwa inilah yang dijanjikan Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar diakhir. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Maidah: 8, yang berbunyi sebagai berikut:

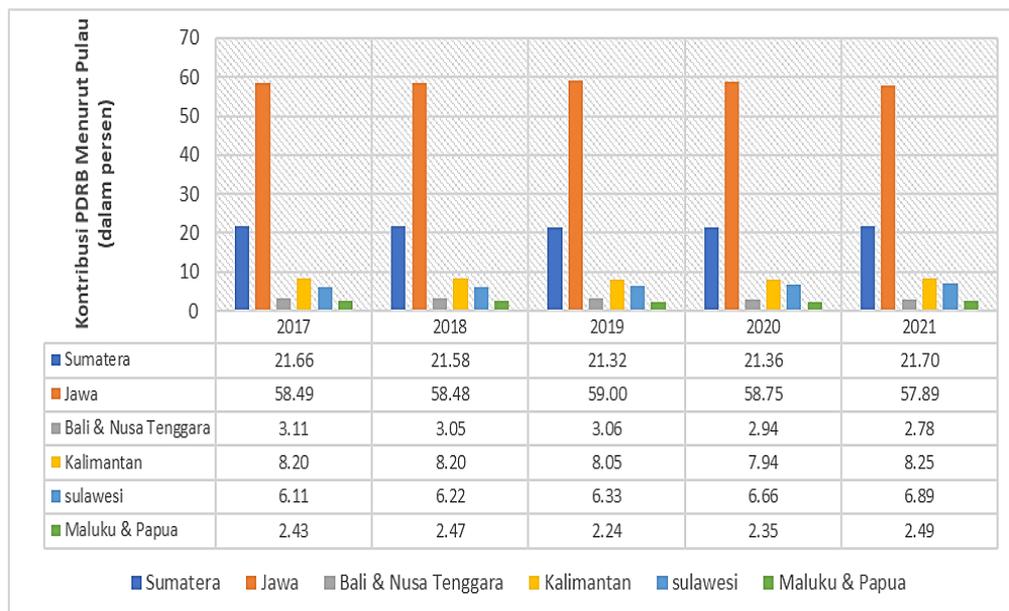
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)

Berdasarkan Propenas (Program Pembangunan Nasional), pembangunan ekonomi merupakan upaya yang berkaitan dengan mendukung terlaksananya salah satu hal penting yang tercantum dalam prioritas pembangunan nasional, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan basis pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas didasarkan pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah (Sari *et al.*, 2019). Selain itu, pembangunan ekonomi di suatu daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB), baik peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, maupun ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian (Arsyad, 2016). Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan. PDRB merupakan salah satu indikator utama dalam perekonomian suatu daerah, baik sektor dalam pertanian, pertambangan, konstruksi maupun lainnya, agar laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor dapat terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Perekonomian pada setiap pulau di Indonesia berbeda-beda, hal ini disebabkan pada setiap pulau di Indonesia memiliki jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan daerah, dan potensi pembangunan daerah yang juga berbeda. Salah satu pulau di Indonesia yang memberikan kontribusi PDRB terbesar terhadap PDB Indonesia adalah Pulau Jawa. Berikut gambar data kontribusi PDRB menurut pulau tahun 2017-2021:



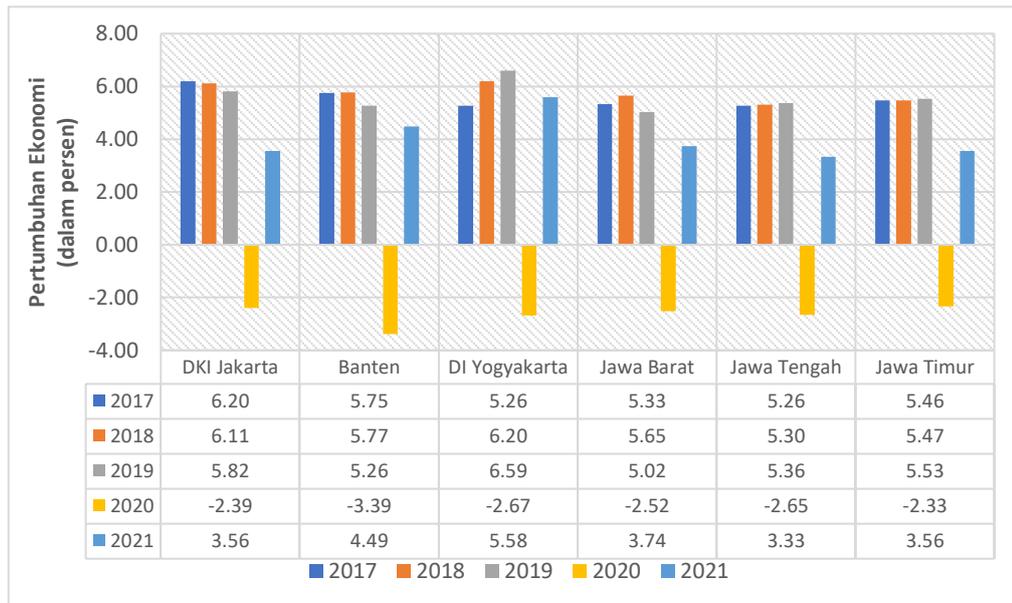
Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.1.

Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2017-2021 (Persen)

Pada Gambar 1.1. menunjukkan bahwa Pulau Jawa di tahun 2019 memiliki kontribusi PDRB tertinggi sebesar 59,00 persen dan kontribusi PDRB terendah ada pada Pulau Maluku dan Papua di tahun 2019 sebesar 2,24 persen. Secara keseluruhan, Pulau Jawa di tahun 2017-2021 memiliki kontribusi PDRB paling tinggi daripada pulau-pulau lainnya. Kemudian kontribusi PDRB tertinggi selanjutnya di tahun 2017-2021 berturut-turut Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan paling terendah Maluku dan Papua.

Kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi antar provinsi di Pulau Jawa merupakan kerja bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Pulau Jawa. Berikut gambar data pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menurut provinsi tahun 2017-2021:



Sumber: BPS Indonesia, 2022 diolah

GAMBAR 1.2.

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2017-2021 (Persen)

Pada Gambar 1.2. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa masih mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Pada Provinsi DKI Jakarta pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5,95 persen. Pada Provinsi Banten mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan mengalami penurunan di tahun 2019 sampai tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 7,88 persen. Pada Provinsi DI Yogyakarta mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 9,26 persen dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5.53 persen. Pada Provinsi Jawa

Barat mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 0,32 persen dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sampai tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 6,26 persen. Pada Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sampai tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,01 persen dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5,98 persen. Pada Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 7,86 persen dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 5,89 persen.

Jika dilihat dari keseluruhan provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6,59 persen di tahun 2019, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada pada Provinsi Banten sebesar -3,39 persen di tahun 2020. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan yang menyentuh diangka minus di tahun 2020 yang disebabkan adanya wabah Covid-19. Adanya wabah Covid-19 berdampak pada seluruh aspek terutama di sektor ekonomi, hal ini akan berpengaruh juga terhadap potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah dalam menopang pertumbuhannya.

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tidak hanya ditopang oleh potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah, tetapi juga ditopang oleh pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak

hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus ditopang oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Keuangan daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk mengarahkan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang sedang berkembang di daerahnya.

Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi keuangan, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih detail mengenai hasil interpretasi yang dicapai. Kinerja keuangan daerah adalah kebijakan fiskal pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah besarnya nilai tambah PDRB yang dihasilkan setiap tahunnya di suatu daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil membutuhkan kebijakan pemerintah yang efektif. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di setiap provinsi juga sangat penting dalam mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tumbuh dan stabil.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan

daerah, dan rasio belanja modal. Rasio efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan penerimaan PAD dibandingkan dengan tingkat target berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeluarkan jumlah biaya untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang dihasilkan. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Rasio belanja modal menunjukkan laporan porsi belanja modal yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sudah beberapa diteliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat.

Penelitian Fatmawati (2021) mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di Riau, temuan ini mengungkapkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Hera *et al.* (2021) mengenai analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap provinsi Pulau Jawa, temuan ini mengungkapkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio kemandirian dan

rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian Azhari *et al.* (2021) mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, temuan ini mengungkapkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas daerah, dan rasio efisiensi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Rossa *et al.* (2018) mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, temuan ini mengungkapkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Farhani (2022) mengenai analisis kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta, temuan ini mengungkapkan bahwa rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio penyerapan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian Putri (2020) mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, temuan mengungkapkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara garis besar adanya kinerja keuangan daerah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2013-2021**”.

B. Batasan Masalah

Cakupan penelitian yang luas ini menuntut peneliti untuk mempersempit masalah agar pembahasan dapat berfokus pada isu-isu kunci yang digariskan dalam rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan PDRB atas harga konstan dalam persen.
2. Kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio belanja modal.
3. Daerah yang diamati adalah Pulau Jawa meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

4. Penelitian ini hanya menggunakan data periode 2013-2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPB KEMENKEU).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
2. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
3. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021?
4. Bagaimana pengaruh rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2013-2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk menentukan seberapa besar anggaran dan pendapatan yang harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.